



# **LAPORAN LKJIP**

## **TAHUN 2021**



**DINAS KESEHATAN,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN 2022**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP )  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN 2022**

## HALAMAN VERIFIKASI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTA ( LKJIP )  
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB  
Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2021

Catatan :

## Kata Pengantar



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun Anggaran 2021 dengan tepat waktu.

Laporan Kinerja disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan (LKJIP/LAKIP) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (RENSTRA), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi upaya pelayanan kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang serta memberikan gambaran secara utuh data/informasi seberapa jauh tingkat pencapaian target kinerja dan menjadi bahan evaluasi dan perencanaan ke depan.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB ini disusun agar dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Sidenreng Rappang, Februari 2022

**Dr. H. Basra, S.Kep., M.Kes.**  
 Kepala Dinas Kesehatan,  
 Pengendalian Penduduk dan KB

Pangkat : Pembina Tk.I  
 NIP : 19701202 199103 1 005

## *Ikhtisar Eksekutif*

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan (LKJIP/LAKIP) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-BK) dengan harapan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, seperti tersedianya akses kesehatan dasar yang terjangkau, mencegah meningkatnya risiko penyakit dan masalah kesehatan, meningkatkan pembiayaan kesehatan yang cukup untuk peningkatan status kesehatan masyarakat dengan ditandai oleh meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, kematian ibu, menurunnya kesakitan karena penyakit menular dan perbaikan gizi masyarakat.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan (LKJIP/LAKIP) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 80/II/2021 tanggal Pebruari 2021 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan (LKJIP/LAKIP) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021, dengan berdasarkan kepada landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945 dan landasan operasional adalah seluruh Peraturan Perundangan yang berlaku dan terkait dengan LKJIP/LAKIP.

LKJIP/LAKIP ini berisikan Pendahuluan, Gambaran Pelayanan Kesehatan, Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan, Subkegiatan dan Indikator Kinerja tujuan, Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2021 serta Penutup.

Selanjutnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKJIP/LAKIP) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 ini perlu ketahui oleh seluruh petugas kesehatan, lintas sektor yang terkait dengan kegiatan kesehatan, swasta dan masyarakat yang telah berkomitmen dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, serta perlu dievaluasi secara berkala sesuai dengan perkembangan dan permasalahan untuk mendapatkan masukan- masukan yang bersifat perbaikan.

*Kata kunci : Laporan LKJIP Bidang Kesehatan*



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
DINAS KESEHATAN,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**

Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A. No. 2 Kabupaten Sidenreng Rappang  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR : 97 Tahun 2021

TENTANG

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN 2021**

KEPALA DINAS KESEHATAN,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 maka dirasa perlu membuat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Tingkat Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/ IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 235);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
  6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15).
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, Nomor 5).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021.
- KESATU : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini diterbitkan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.
- KETIGA : Hal-hal yang belum ditetapkan dalam keputusan ini, akan ditetapkan kemudian.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidenreng Rappang  
Pada Tanggal, 11 Februari 2021

Kepala Dinas Kesehatan  
Pengendalian Penduduk dan KB  
Kabupaten Sidenreng Rappang,



**Dr. Ns. M. BASRA, S.Kep, M. Kes**

Pangkat : Pembina TK.1

NIP: 19701202 1991031 005

## Daftar Isi

HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR	i
HALAMAN VERIFIKASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
SK KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Landasan Hukum	2
1.4 Gambaran Umum	3
A. Struktur Organisasi	4
B. Sumber Daya Manusia	5
1.5 Isu – Isu Organisasi dan Prioritas	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>10</b>
2.1 Perencanaan Strategis	10
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	17
2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2021	19
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>17</b>
A. Sasaran Strategis	23
a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini	24
b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	25
c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	27
d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	27
e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan	28
B. Realisasi Anggaran	30
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>39</b>
A. Kesimpulan	39
B. Langkah Kedepan	40

## Daftar Tabel

❖ Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia berdasarkan pendidikan	5
❖ Tabel 1.2 Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan	5
❖ Tabel 1.3 Sumber Daya manusia berdasarkan Profesi	6
❖ Tabel 1.4 Jenis dan Jumlah Sarana Kesehatan	6
❖ Tabel 2.1 Pernyataan Visi, Pokok Visi, dan Penjelasan Pokok Visi	11
❖ Tabel 2.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan	15
❖ Tabel 2.3 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	16
❖ Tabel 2.4 Penetapan Indikator Kinerja Utama	18
❖ Tabel 2.5 Matriks Rencana Kinerja Tahun 2021	19
❖ Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2021	22
❖ Tabel 3.2 Analisis Capaian Kinerja	23
❖ Tabel 3.3 Perbandingan antara target dan realisasi sasaran	24
❖ Tabel 3.4 Perkembangan Pencapaian Sasaran Strategis	25
❖ Tabel 3.5 Perbandingan Target Realisasi Sasaran 2	26
❖ Tabel 3.6 Efisiensi Pengguna Sumber daya Sasaran	27
❖ Tabel 3.7 Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja Utama	30

## Daftar Gambar

---

- ❖ Bagan Struktur Organisasi 4



# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

**LAPORAN LKJIP**  
**TAHUN 2021**

**DINAS KESEHATAN,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**TAHUN 2022**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel, maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas serta terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB menyusun Perencanaan Strategik sesuai dengan kebutuhan Dinas Kesehatan dengan menampung sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang, serta indikator-indikator penunjangnya. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2021 merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten selama Tahun 2021 kepada Bupati. Laporan akuntabilitas ini disusun dalam rangka pelaksanaan Tap MPR Nomor : XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dari pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan yaitu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia baik masyarakat, swasta maupun pemerintah.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai IPM tersebut, salah satu komponen utama yang mempengaruhinya adalah indikator status kesehatan, selain pendidikan dan pendapatan perkapita. Dengan demikian pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mendukung percepatan pembangunan nasional.

Dalam rangka mencapai tujuan dan cita – cita bangsa dan Negara tersebut serta untuk mewujudkan aspirasi masyarakat maka diperlukan suatu prasyarat yaitu pemerintahan yang baik (*good governance*). Agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tersebut dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme maka diperlukan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan tersebut telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang intinya mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2021, disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan (LKJIP) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja.

## 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan (LKJIP) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 dimaksud sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Tujuannya untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang efektif – efisien, meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi Dinas Kesehatan selama satu tahun baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan, maupun koordinasi pelaksanaannya.

## 1.3 LANDASAN HUKUM

- a. Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri PAN No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review Atas Laporan Kinerja.

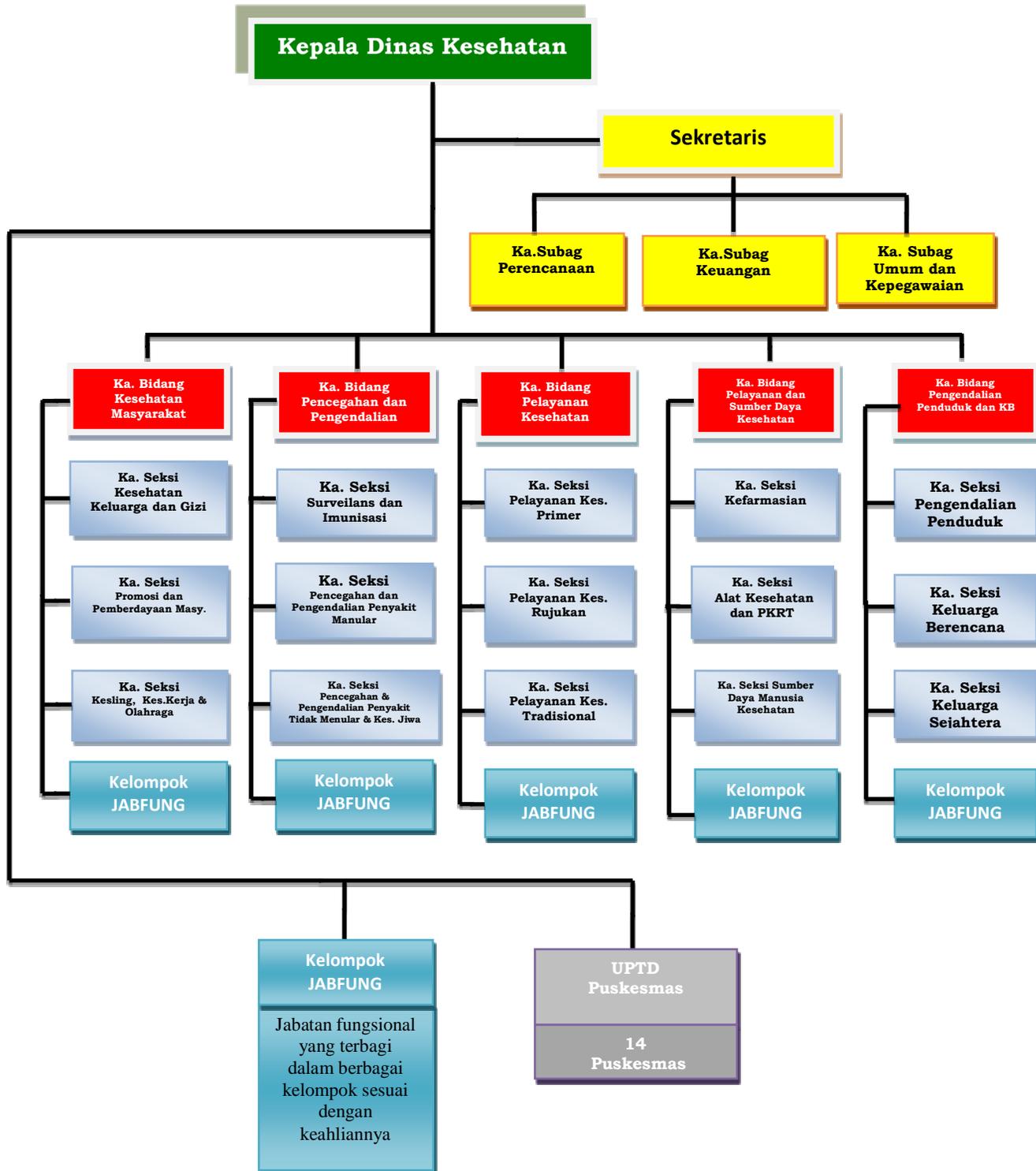
## 1.4 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

### A. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut, yang selanjutnya disajikan dalam bentuk skema sebagaimana terlampir.

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Perencanaan
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
  - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
  - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
  - c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :
  - a. Seksi Surveilans dan Imunisasi
  - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
  - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
5. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
  - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
  - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
  - c. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional
6. Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan, membawahi :
  - a. Seksi Kefarmasian
  - b. Seksi Alat Kesehatan dan PKRT
  - c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
7. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi:
  - a. Seksi Pengendalian Penduduk
  - b. Seksi Keluarga Berencana
  - c. Seksi Keluarga Sejahtera
8. Jabatan Fungsional
9. UPTD Puskesmas

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



## B. Sumber Daya Manusia

Tiap jenis tenaga kesehatan mempunyai rasio berdasarkan IIS 2010 (Indonesia Sehat 2010). Berdasarkan hal ini, masing – masing menurut rasio jenis tenaga kesehatan akan dipaparkan agar menjadi bahan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan.

**Tabel.1.1**  
**SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN PENDIDIKAN**

NO	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	SD	22
2.	SLTP	12
3.	SLTA	132
4.	D-1	7
5.	D-3	994
6.	D-4	112
7.	S-1	483
8.	S-2	61
9.	S-3	1
10.	SP-1	40
11.	PROF	409

Sumber : Profil Dinkes, Dal-Duk Kab. Sidenreng Rappang tahun 2021

Jumlah SDM yang ada di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Pendidikan lebih banyak pada tingkat pendidikan D-3 dengan jumlah 994.

**Tab.1.2**  
**SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN GOLONGAN**

NO	JENIS GOLONGAN	JUMLAH
1.	I	2
2.	II	167
3.	III	337
4.	IV	126

Sumber : Profil Dinkes, Dal-Duk Kab. SidenrengRappang tahun 2021

Jumlah SDM yang ada di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Golongan lebih banyak pada Golongan III dengan jumlah 358.

**Tabel. 1.3**  
**SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN PROFESI**

NO	JENIS TENAGA / PROFESI	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	WANITA	
1.	Dokter Spesialis	20	21	41
2.	Dokter Umum	13	50	63
3.	Dokter Gigi	4	16	20
4.	Perawat	170	519	689
5.	Bidan	0	499	499
6.	Farmasi	12	75	87
7.	Kesehatan Masyarakat	35	128	163
8.	Kes. Lingkungan	9	37	46
9.	Gizi	2	54	56
10.	Keterampilan Fisik	7	10	17
11.	Keteknisan Medis	13	34	47
12.	Teknik Biomedika	27	60	87
13.	Tenaga Kes. Lainnya	3	28	31

Sumber : Profil Dinkes, Dal-Duk Kab. SidenrengRappang tahun 2021

Jumlah SDM di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Profesi lebih banyak tenaga Perawat dengan jumlah 696.

**Tabel. 1.4**  
**JENIS DAN JUMLAH SARANA KESEHATAN**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 2021**

NO	JENIS SARANA PELAYANAN	JUMLAH
1.	Rumah Sakit Umum Pemerintah	2
2.	Rumah Sakit Swasta	1
3.	Puskesmas Rawat Inap	12
4.	Puskesmas Non Rawat Inap	2
5.	Puskesmas Pembantu	47
6.	Puskesmas Keliling	24
7.	Posyandu	314
8.	Poskesdes/Polindes	98
9.	BP/Klinik	2
10.	Apotik	34
11.	Toko Obat	55
12.	Praktek Dokter	66
13.	Bidan Praktek	44
14.	Puskel Darat Roda 4	54
15.	Puskel Darat Roda 2	224

Sumber : Profil Dinkes, Dal-Duk Kab. Sidenreng Rappang tahun 2021

Dapat dilihat bahwa sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, hamper merata di seluruh kecamatan terutama sarana pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat yaitu puskesmas, puskesmas pembantu dan poskesdes/polindes.

### **1.5 ISU-ISU ORGANISASI DAN PRIORITAS DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Dari beberapa isu yang saat ini berkembang, ada beberapa isu strategis yang dianggap prioritas pada penentuan fokus arah kegiatan sektor kesehatan, yang harus menjadi perhatian Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penentuan strategis dan kebijakan untuk mewujudkan pembangunan kesehatan di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Rumusan isu – isu di bidang kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain :

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja dan lansia
2. Peningkatan program pengendalian masalah kesehatan ibu, anak dan remaja
3. Upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi
4. Peningkatan kemitraan swasta, peran lintas sektor dan pelayanan gizi masyarakat (posyandu, poskestren, poskesdes, dll)
5. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
6. Peningkatan penanganan dan pengendalian bencana dan kejadian luar biasa (KLB)
7. Peningkatan akses air minum dan sanitasi berkualitas dan memenuhi syarat
8. Peningkatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) melalui penerapan 5 pilar
9. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit bersumber binatang
10. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan imunisasi
11. Peningkatan pengawasan dan pembinaan TTU/TPM
12. Peningkatan ketersediaan, pemerataan keterjangkauan obat dan alkes
13. Peningkatan pelayanan kefarmasian yang efektif dan efisien termasuk penggunaan obat yang rasional
14. eningkatan pengawasan obat, alkes, PKRT, oba tradisional, kosmetik dan makanan yang beredar termasuk pangan jajanan anak sekolah (PJAS)

15. Peningkatan pengawasan upaya kesehatan tradisional dan pengembangan obat asli Indonesia
16. Peningkatan Capaian PHBS , Sekolah, Tempat Kerja, Tempat Umum dan Sarana Kesehatan
17. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat terutama upaya kesehatan berbasis masyarakat, kemitraan swasta dan peran lintas sektor
18. Pengembangan JKN melalui :
  - a. Peningkatan Fasyankes.
  - b. Pemenuhan SDM kesehatan baik kualitas maupun kuantitas dan distribusinya.
19. Perbaiki pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan
20. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan rujukan
21. Peningkatan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas dan merata
22. Peningkatan manajemen dan system informasi kesehatan
23. Peningkatan upaya pelaksanaan jaminan kesehatan nasional
24. Peningkatan pengawasan dan pengendalian kesehatan jiwa
25. Penurunan jumlah rata – rata anak perkeluarga menjadi 2 orang
26. Mengatur jarak kelahiran pada masyarakat
27. Peningkatan pemakaian alat kontrasepsi pada pasangan usia subur

Berdasarkan isu – isu tersebut dapat dijadikan sebagai isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan pemberdayaan masyarakat, kemitraan swasta dan peran lintas sektor dalam pelayanan gizi masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta peningkatan capaian PHBS.
2. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta penanganan Bencana/KLB, Kesehatan Matra dan Surveilas epidemiology dan Kualitas air minum.
3. Peningkatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) dan pembinaan / pengawasan TTU/TPM
4. Peningkatan ketersediaan obat, alkes dan pengawasan sediaan farmasi, alkes, PKRT, dan makanan, serta upaya kesehatan tradisional dan pengembangan obat asli Indonesia
5. Peningkatan pemakaian alat kontrasepsi pada pasangan usia subur
6. Pengembangan JKN melalui :
  - a. Peningkatan fasilitas yankes dan kualitas pelayanan yang menyeluruh
  - b. Peningkatan SDM Kesehatan yang berkualitas dan merata
  - c. Peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan secara menyeluruh

7. Peningkatan manajemen dan sistem informasi kesehatan serta sinkronisasi perencanaan dan kebijakan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.



# **BAB II**

# **PERENCANAAN**

# **KINERJA**

**LAPORAN LKJIP**  
**TAHUN 2021**

**DINAS KESEHATAN,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**TAHUN 2022**

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang disusun untuk memberikan gambaran pelayanan, pengembangan dan pembangunan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang serta langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mencapai tujuan, memberikan pedoman bagi arah jalannya pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 Bidang Kesehatan dan pengendalian penduduk dan KB
2. Merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021-2023.
3. Sebagai pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, maupun pengawasan pembangunan dan pelayanan bidang kesehatan dan pengendalian penduduk dan KB kepada masyarakat.
4. Merupakan acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja Bidang Kesehatan dan pengendalian penduduk dan KB
5. Menyediakan tolak ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah
6. Merupakan rencana antisipatif dan inovatif dalam menghadapi berbagai perubahan laju pembangunan Kesehatan yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang.
7. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mencapai tujuan pembangunan jangka menengah bidang kesehatan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu dan terukur.

**a. Visi**

Visi merupakan kondisi yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Dalam rangka mendukung visi Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang, maka program Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB tidak lepas dari visi dan misi kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2018 – 2023 yang dijadikan dasar adalah :

**“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang  
Sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat  
Religius, Aman, Adil dan Sejahtera”.**

Rumusan visi tersebut mencakup lima pokok visi, yakni “Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang Maju”, dengan masyarakat yang Religius, Aman, Adil, dan Sejahtera.

Kelima pokok visi tersebut yang menjadi fokus gerakan pembangunan baik semua unsur untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya kelima pokok visi tersebut dijabarkan pemaknaannya sesuai dengan “Sidenreng Rappang” yang dicita – citakan dan diharapkan di masa depan, sebagai berikut :

**Tabel.2.1**

**PERNYATAAN VISI, POKOK VISI, DAN PENJELASAN POKOK VISI  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

VISI	Pokok–Pokok Visi	Penjelasan Pokok Visi
Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera	Agribisnis yang Maju	Pengembangan daerah yang berbasis usaha pertanian terpadu, modern dan berkelanjutan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang
	Religius	Masyarakat Sidenreng Rappang adalah insan yang bertaqwa, berperilaku taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki karakter teguh terhadap nilai – nilai agama, bersikap toleran dan menjalin kerukunan hidup dengan pemeluk agama lain, serta kepekaan sosial yang tinggi
	Aman	Terwujudnya kehidupan sosial masyarakat Sidenreng Rappang yang tenteram dan kondusif yang ditandai dengan menurunnya angka kriminalitas

VISI	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Pokok Visi
	Adil	Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang tanpa diskriminasi yang ditandai dengan adanya pemberian kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sehingga terwujud pemerataan pembangunan yang berkeadilan
	Sejahtera	Peningkatan kualitas hidup masyarakat Sidenreng Rappang yang ditandai dengan meningkatnya IPM, pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan dan ketimpangan, serta terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat, baik material maupun non material

Sumber Data : Perubahan RENSTRA 2018-2023 Dinkes, Dalduk dan KB Kab. Sidenreng Rappang

#### b. Misi

Misi berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur dalam upaya mewujudkan visi. Misi Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

**Misi 1** : Memajukan dan Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan dalam rangka peningkatan Kualitas Hidup masyarakat.

#### c. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor – faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit daripada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa datang.

Tujuan bersifat untuk memberikan arah yang lebih jelas agar perbaikan – perbaikan / harapan yang ingin dicapai lebih berfokus sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing. Berdasarkan visi, misi,

dan faktor-faktor Keberhasilan. Ada dua Tujuan dalam Perubahan Renstra Dinas kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang periode tahun 2018 – 2023 adalah :

- Tujuan 1** (Urusan Bid. Kesehatan) : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
- Tujuan 2** (Urusan Bid. Dalduk dan KB) : Terwujudnya Keluarga Sejahtera

#### d. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai serta diharapkan dapat memberikan fokus pada

penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Berdasarkan makna tersebut maka, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan Sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1** (Urusan Bid. Kesehatan) : 1. Meningkatnya pelayanan Kesehatan Masyarakat
- Sasaran 2** (Bid Dalduk dan KB) : 2. Menurunnya Angka Kelahiran Total  
3. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern

#### e. Strategis

Strategis merupakan langkah atau upaya berisikan program – program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka dirumuskan berbagai strategis pembangunan daerah pada bidang kesehatan. Adapun *Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang* dalam pembangunan bidang kesehatan adalah :

- Strategi 1** ( Urusan Bid. Kesehatan) : 1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang paripurna, bermutu, terjangkau dan merata  
2. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat  
3. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan  
4. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan yang berkualitas

5. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan kualitas farmasi dan alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan

**Strategi 2** (Urusan Bid Dalduk : dan KB) : 6. Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga

7. Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)
8. Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR.

#### f. Arah Kebijakan

Berdasarkan rumusan strategis, selanjutnya dirumuskan arah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk lima tahun yang akan datang, Permendagri No.86 tahun 2017 menegaskan bahwa arah kebijakan merupakan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah / perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategis. Selengkapanya arah kebijakan yang akan ditempuh Kabupaten Sidenreng Rappang untuk lima tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

**Arah Kebijakan 1** (Urusan Bid. Kesehatan) : 1. Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar

2. Penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan
3. Intervensi berbasis resiko kesehatan
4. Peningkatan Cakupan Pelayanan Kesehatan yang menekan pada tersedianya fasilitas kesehatan yang yang standar termasuk Jaminan Pelaksanaan Asuransi Kesehatan Nasional dan Daerah Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar

**Arah Kebijakan 2** (Urusan Bid Dalduk dan KB) : 5. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga

**Tabel.2.2**  
**VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN**  
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

<b>Visi</b> : Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang maju Dengan masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera			
<b>Misi 1</b> : Memajukan dan Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategis</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Meningkatkan Derajat Kesehatan masyarakat	1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang paripurna, bermutu, terjangkau dan merata</li> <li>2. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat</li> <li>3. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan</li> <li>4. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan yang berkualitas</li> <li>5. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan kualitas farmasi dan alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar</li> <li>2. Penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan</li> <li>3. Intervensi berbasis resiko kesehatan</li> <li>4. Peningkatan Cakupan Pelayanan Kesehatan yang menekan pada tersedianya fasilitas kesehatan yang standar termasuk Jaminan Pelaksanaan Asuransi Kesehatan Nasional dan Daerah Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar</li> </ol>
2. Terwujudnya keluarga Sejahtera	2. Menurunnya Angka Kelahiran Total	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga.</li> <li>7. Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)</li> <li>8. Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/ jejaring yang melayani KBKR</li> </ol>	5. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga
	3. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern		

Sumber Data : Perubahan RENSTRA 2018-2023 Dinkes, Dalduk dan KB Kab. Sidenreng Rappang

**Tabel.2.3**  
**TUJUAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN**  
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		1. Indeks Kesehatan
	1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	2. Angka Kematian Ibu (per 100,000 kelahiran hidup)
		3. Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)
		4. Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)
		5. Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
		6. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)
		7. Indeks Kepuasan masyarakat (%)
2. Terwujudnya keluarga sejahtera		8. Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total
	2. Menurunnya Angka Kelahiran Total	9. Rata-rata jumlah anak per keluarga pasangan usia subur
	3. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern	10. Ratio Akseptor KB

Sumber Data : Perubahan RENSTRA 2018-2023 Dinkes, Dalduk dan KB Kab. Sidenreng Rappang

## 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### MATRIKS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Kabupaten : Sidenreng Rappang

OPD : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

TUGAS DAN FUNGSI :

**Tugas :** Menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang upaya kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman serta Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan

**Fungsi :**

1. Perumusan kebijakan teknis bidang upaya kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman serta Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang upaya kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman serta Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang upaya kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman serta Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pencapaian Indikator Tujuan dan Sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian target indikator program. Penetapan indikator kinerja utama selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel.2.4**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL RENSTRA 2019	TARGET				KONDISI AKHIR RENSTRA 2023
			2020	2021	2022	2023	
1	2	4	5		6	7	8
<b>Bidang Kesehatan</b>							
1	Indeks Kesehatan	76,29	75,57	76,97	77,27	77,58	77,58
2	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	6	23	21	20	19	19
3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	1,6	0,51	19,5	18,6	17,6	17,6
4	Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	1,4	0,6	< 1	< 1	< 1	< 1
5	Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	195	3	330	340	340	340
6	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	100	100	100	100	100	100
7	Indeks Kepuasan masyarakat (%)	74,58	76,61	77,14	78,32	80,80	80,80
<b>Bidang Pengendalian Penduduk dan KB</b>							
8	Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total	2,28	2,16	2,14	2,07	2,05	2,05
9	Rata-rata jumlah anak per keluarga pasangan usia subur	2,28	2,16	2,14	2,07	2,05	2,05
10	Ratio Akseptor KB	75	78	80	85	90	90

### 2.3 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

Rencana kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB tahun 2021 adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 yang direviu Tahun 2021, Rencana Kinerja yang ditetapkan tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja yang ada pada tingkat sasaran, yang merupakan komitmen bagi Dinas kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mencapainya dalam tahun 2021.

Sasaran dan Indikator Kinerja kelompok sasaran Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel.2.5**  
**MATRIKS RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021**

Sasaran	Indikator Kinerja	Program /Kegiatan	Target
1. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat <b>(Urusan Bid. Kesehatan )</b>	1. Angka Kematian Ibu (per 100,000 kelahiran hidup) 2. Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup) 3. Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV) 5. Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 6. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%) 7. Indeks Kepuasan masyarakat (%)	<b>1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	15 %
		✓ Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %
		✓ Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %
		✓ Penyelenggaraan informasi kesehatan secara terintegrasi	100 %
		<b>2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	72 %
		✓ Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	100 %
		✓ Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100 %
		✓ Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %
		<b>3. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	100 %
		✓ Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100 %
✓ Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100 %		

Sasaran	Indikator Kinerja	Program /Kegiatan	Target
		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</li> </ul>	100 %
		<b>4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	70 %
		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>	100 %
		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>	100 %
		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>	100 %
2. Menurunnya angka kelahiran total <b>(Urusan Bid. Dalduk dan KB)</b>	8. Rata-rata jumlah anak perkeluarga pasangan usia subur	<b>5. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	100 %
		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</li> </ul>	100 %
		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</li> </ul>	100 %
		<b>6. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	100 %
		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</li> </ul>	100 %
3. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern <b>(Urusan Bid. Dalduk dan KB)</b>	9. Ratio Akseptor KB	<b>7. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	100 %
		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</li> </ul>	100 %
		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</li> </ul>	100 %
		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>	100 %
		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB</li> </ul>	100 %

Perencanaan Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 melalui program, kegiatan, dan pendanaan urusan pemerintahan dan program prioritas bidang pembangunan bidang kesehatan terkait pencapaian misi tertuang dalam RPJMD 2018 – 2023.



# **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

**LAPORAN LKJIP  
TAHUN 2021**

**DINAS KESEHATAN,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN 2022**

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021 tidak terlepas dari rangkaian fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (RPJMD dan RENSTRA), Rencana Kerja Tahunan (RENJA) dan Penetapan Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, serta tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggung jawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung Jawaban pengukuran yang diukur adalah capaian program, kegiatan, sub kegiatan dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana program, kegiatan, sub kegiatan dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Terdapat dua jenis skala penilaian pengukuran :

1. Bilamana indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2021**

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
5	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
4	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
2	51% ≤ 55%	Rendah
1	≤ 50%	Sangat Rendah

2. Sebaliknya bila indikator Sasaran mempunyai makna progres negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :

**Tabel 3.1.a**  
**Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2021**

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
5	91% ≤ 100%	Sangat Rendah
4	76% ≤ 90%	Rendah
3	66% ≤ 75%	Sedang
2	51% ≤ 55%	Tinggi
1	≤ 50%	Sangat Tinggi

#### A. SASARAN STRATEGIS

**Tabel 3.2**  
**ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Urusan Bid. Kesehatan)		1. Indeks Kesehatan	76,97	76,94	99,96
	1. Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat	2. Angka Kematian Ibu (per 100,000 kelahiran hidup)	21	7	33,33
		3. Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	19,5	4,5	23,08
		4. Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	< 1	0,1	11,11
		6. Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	330	136	41,21
		7. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	100	100	100
		8. Indeks Kepuasan masyarakat (%)	77,14	76,61	99,31
		2. Terwujudnya keluarga Sejahtera . (Urusan Bid. Dalduk dan KB)		10. Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total	2,08
	2. Menurunnya Angka Kelahiran Total	11. Rata-rata jumlah anak per keluarga pasangan usia subur	2,2	2,14	100
	3. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern	11. Ratio Akseptor KB	55,30	76,81	96,01

Sasaran Strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke 1 dan misi ke 5 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018 – 2023 yaitu :

**Misi 1** : Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan Pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.

**Misi 5** : Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan professional birokrasi Pemerintah daerah dalam pelayanan public melalui penerapan Good governance dan Electronic governance.

Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat beberapa Indikator Kinerja dengan analisis pencapaian sebagai berikut :

**Sasaran 1** : Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat

**Sasaran 2** : Menurunnya Angka Kelahiran Total

**Sasaran 3** : Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern

#### a. PERBANDINGAN ANTAR TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

**Tabel 3.3**  
**PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI SASARAN**

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)
		TARGET	REALISASI	
1. Indeks Kesehatan	Indeks	76,97	76,94	99,96
2. Angka Kematian Ibu (per 100,000 kelahiran hidup)	Kasus	21	7	33,33
3. Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	Per 1000 kelahiran	19,5	4,5	23,08
4. Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	Per 1000 Penduduk	< 1	0,1	11,11
5. Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 Penduduk	330	136	41,21
6. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	%	100	100	100
7. Indeks Kepuasan masyarakat (%)	%	77,14	76,61	99,31
8. Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total	%	2,08	2,14	100
9. Rata-rata jumlah anak per keluarga pasangan usia subur	Anak/ Keluarga	2,2	2,14	100
10. Ratio Akseptor KB	%	55,30	76,81	96,01
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>				76,62

Sumber Data : Perubahan RENSTRA 2018-2023 Dinkes, Dalduk dan KB Kab. Sidenreng Rappang

Pengukuran capaian Indikator kinerja pada tujuan satu yaitu Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Urusan Bid. Kesehatan) menunjukkan realisasi capaian *Indeks Kesehatan 76,94%* dari *target 76.97%* dan rata – rata capaian kinerja yaitu sebesar 99,96 % atau dengan kriteria **Sangat Tinggi**. Dan Capaian Indikator kinerja pada tujuan dua yaitu Terwujudnya keluarga Sejahtera . (**Urusan Bid. Dalduk dan KB**) menunjukkan realisasi capaian *Indeks Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total 76.61%* dari *target 77.14%* dan rata – rata capaian kinerja yaitu sebesar 99,31 % atau dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

**b. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR.**

**Tabel 3.4**  
**PERKEMBANGAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS**

Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi				Capaian (%)			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1. Indeks Kesehatan	Indeks	75,62	76,29	76,66	76,94	98,01	98,33	98,81	99,96
2. Angka Kematian Ibu (per 100,000 kelahiran hidup)	Kasus	2	4	6	7	39,08	37,21	35,46	33,33
3. Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	Per 1000 kelahiran	3,5	4	3,8	4,5	22,45	23,00	22,83	23,08
4. Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	Per 1000 Penduduk	0,003	0,01	0,05	0,1	9,05	10,00	10,45	11,11
5. Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 Penduduk	256	202	121	136	61,01	58,22	35,21	41,21
6. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
7. Indeks Kepuasan masyarakat (%)	%	-	75,1	76,61	76,61	-	99,1	99,45	99,31
8. Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total	%	2,14	2,28	2,16	2,14	97,27	97,02	97,46	100
9. Rata-rata jumlah anak per keluarga pasangan usia subur	Anak/Keluarga	2,14	2,28	2,16	2,14	97,27	97,02	97,46	100
10. Ratio Akseptor KB	%	79,75	77,75	76,25	76,81	99,77	99,01	99,34	96,01

Sumber Data : Perubahan RENSTRA 2018-2023 Dinkes, Dalduk dan KB Kab. Sidenreng Rappang

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja pada sasaran strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik telah mencapai target. Rata – rata capaian kinerja pada tahun 2021 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu naik menjadi pada tahun 2021.

**c. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI.**

**Tabel 3.5**  
**PERBANDINGAN TARGET REALISASI SASARAN**  
**DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH**

Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah
1. Indeks Kesehatan	Indeks	76,94	Tinggi
2. Angka Kematian Ibu (per 100,000 kelahiran hidup)	Kasus	7	Tinggi
3. Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	Per 1000 kelahiran	4,5	Sangat tinggi
4. Insidensi HIV 5. (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	Per 1000 Penduduk	0,10	Sangat tinggi
6. Insidensi tuberkulosis 7. (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 Penduduk	136	Sangat tinggi
8. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	%	100	Sangat tinggi
9. Indeks Kepuasan masyarakat (%)	%	76,81	Tinggi
10. Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total	%	2,14	Tinggi
11. Rata-rata jumlah anak per keluarga pasangan usia subur	Anak/ Keluarga	2,14	Tinggi
12. Ratio Akseptor KB	%	76,61	Tinggi

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 75.7% dan 76.61 sedangkan target jangka menengah sebesar 75.7% dan 76.61 perbandingan rata – rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2021 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang maka indikator tersebut telah mencapai target jangka menengah.

**Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja.**

**PERMASALAHAN YANG DIHADAPI :**

1. Terbatasnya tenaga, baik segi kuantitatif maupun kualitatif jika dibandingkan dengan jumlah penduduk.
2. Sarana dan prasarana serta alat kesehatan di bidang kesehatan belum mencapai ideal.
3. Kondisi alam berupa cuaca dan geografis yang memicu terjadinya bencana (banjir) di sebagian wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan banyaknya genangan air mempermudah perkembangbiakan nyamuk dan sumber penularan penyakit lainnya.

**SOLUSI :**

Terkait permasalahan yang dihadapi dan kondisi yang ada, maka diambil strategis dan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan pelayanan kesehatan secara efektif dengan sarana dan prasarana yang tersedia.
2. Sosialisasi dan pembinaan secara intensif ke puskesmas.
3. Memperkuat kerjasama lintas sektor dan pihak ketiga yang dapat mendukung pembangunan kesehatan.
4. Pengefektifan sistem keuangan dan anggaran.
5. Prioritas upaya kesehatan pada kegiatan promotif dan preventif selain kuratif dan rehabilitatif.

**UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM PENCAPAIAN PENINGKATAN TARGET**

1. Optimalisasi deteksi dini resiko tinggi dan terlaksananya rujukan dini terencana pada Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas.
2. Pendampingan Puskesmas untuk kegiatan reakreditasi pada tahun 2021.
3. Peningkatan peran aktif dalam rangka sosialisasi terhadap pentingnya kepesertaan JKN kepada masyarakat dan bekerja sama BPJS Kesehatan dan Lintas Sektor terkait.
4. Optimalisasi SDM dan Sarana Prasarana serta Alat Kesehatan Pada Pelayanan Kesehatan secara bertahap sesuai kemampuan daerah.
5. Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, peran serta masyarakat di bidang kesehatan.

**d. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.**

**Tabel 3.6**  
**Efisiensi pengguna Sumber daya Sasaran**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Urusan Bid. Kesehatan)		1. Indeks Kesehatan	76,94	85.19	Tinggi
	1. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat	2. Angka Kematian Ibu (per 100,000 kelahiran hidup)	7		
		3. Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	4,5		
		4. Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,10		
		5. Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	136		
		6. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	100		
		7. Indeks Kepuasan masyarakat (%)			

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
2. Terwujudnya keluarga Sejahtera (Urusan Bid. Dalduk dan KB)		8. Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total	2,14	69,17	Sedang
	1. Menurunnya Angka Kelahiran Total	9. Rata-rata jumlah anak per keluarga pasangan usia subur	2,14		
	2. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern	10. Ratio Akseptor KB	76,61	85, 81	Tinggi

**e. Analisis Program/Kegiatan/Sub kegiatan yang menunjang keberhasilan.**

1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
  - a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - c. Penyelenggaraan informasi kesehatan secara terintegrasi
2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
  - a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
  - b. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
  - c. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
  - a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
  - b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
  - c. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
  - a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

5. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
  - a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
  - b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
6. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
  - a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
7. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
  - a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
  - b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
  - c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
  - d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB

**B. REALISASI ANGGARAN**

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mendukung terwujudnya pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka menunjang tercapainya sasaran strategis dan indikator kinerja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.7**  
**REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

No	SASARAN Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen %
I.	<b>MENINGKATNYA PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>46.596.252.429</b>	<b>39.230.748.540</b>	<b>84,19</b>
1.	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>45.343.731.429</b>	<b>38.628.289.140</b>	<b>85,19</b>
	<b>a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>31.718.201.033</b>	<b>28.977.194.046</b>	<b>91,36</b>
	1) Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	2.080.000.000	0	0
	2) Pembangunan Puskesmas	19.440.151.400	19.438.679.400	99,9
	3) Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	234.662.500	131.479.000	56,03
	4) Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	2.069.547.000	2.069.547.000	100,00
	5) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.395.534.000	3.393.134.000	99,93
	6) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	518.640.808	496.294.807	95,69
	7) Pengadaan Obat, Vaksin	1.515.928.580	94.401.600	89,56
	8) Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.338.068.745	2.005.593.380	85,78
	9) Pemeliharaan Rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan Kesehatan	125.668.000	84.768.000	67,45
	<b>b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>13.595.398.196</b>	<b>9.623.675.694</b>	<b>70,79</b>
	1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	103.087.000	101.548.000	98,51
	2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	2.481.578.996	371.625.284	4,98

No	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen %
3)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	7.400.000	3.100.000	41,89
4)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	8.000.000	7.700.000	96,25
5)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	7.000.000	3.900.000	55,71
6)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	31.046.000	30.146.000	97,10
7)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Lanjut Usia	3.709.000	3.660.000	98,68
8)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1.728.000	0	0
9)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	58.655.200	58.092.440	99,04
10)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	15.015.000	2.600.000	17,32
11)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	42.072.000	2.540.000	6,04
12)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	56.088.000	1.270.000	2,26
13)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100.000	-	-
14)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.784.086.200	1.650.611.400	92,52
15)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	43.752.000	25.820.000	59,01
16)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	187.691.600	175.054.610	93,27
17)	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	219.358.000	190.512.860	86,85
18)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan mandiri dan Tradisional lainnya	2.742.000	2.704.000	98,61
19)	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	686.811.400	473.965.400	69,01
20)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	37.551.800	35.600.800	94,80
21)	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	1.496.000	1.399.000	93,52
22)	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	184.154.000	144.419.500	78,42
23)	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5.918.488.000	5.550.440.400	93,78
24)	Deteksi Dini Penyalahgunaan Napza di Fasyankes dan Sekolah	50.126.000	50.126.000	100,00
25)	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100.000	0	0
26)	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	21.380.000	21.115.000	98,76
27)	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5.386.000	-	-
28)	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1.076.393.000	381.291.000	35,42
29)	Investigasi Awal Kejadian tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian obat Massal)	560.303.000	334.434.000	59,69
30)	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon wabah	100.000	0	0

No	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen %
	<b>c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	<b>30.132.200</b>	<b>27.419.400</b>	<b>91.00</b>
	1) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	30.132.200	27.419.400	91,00
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	<b>244.170.000</b>	<b>196.771.000</b>	<b>80.59</b>
	<b>a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>6.202.000</b>	<b>6.060.000</b>	<b>97.71</b>
	1) Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta tindak lanjut perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	6.202.000	6.060.000	97,71
	<b>b. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>68.492.000</b>	<b>57.206.000</b>	<b>83.52</b>
	1) Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	68.492.000	57.206.000	83,52
	<b>c. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>169.476.000</b>	<b>133.505.000</b>	<b>78.78</b>
	1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Tk. Daerah Kabupaten/Kota	169.476.000	133.505.000	78,78
<b>3.</b>	<b>Program Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Minuman</b>	<b>159.522.000</b>	<b>57.500.000</b>	<b>36.05</b>
	<b>a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	<b>6.165.000</b>	<b>5.670.000</b>	<b>91.97</b>
	1) Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, toko obat, toko alkes dan optikal, UMOT	6.165.000	5.670.000	91,97
	<b>b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	<b>36.232.000</b>	<b>1.995.000</b>	<b>5.51</b>
	1) Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri Rumah Tangga dan No.P-IRT sebagai izin Produksi, untuk produksi makanan minuman tertentu yg diproduksi oleh IRT	36.232.000	1.995.000	5,51
	<b>c. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman IRT.</b>	<b>117.125.000</b>	<b>49.835.000</b>	<b>42.55</b>

No	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen %
	1) Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan minuman industri Rumah Tangga yang beredar dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan	117.125.000	49.835.000	42,55
<b>4.</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</b>	<b>848.829.000</b>	<b>348.188.400</b>	<b>41.02</b>
	<b>a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>347.479.000</b>	<b>341.388.400</b>	<b>98.25</b>
	1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	347.479.000	341.388.400	98.25
	<b>b. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.170.000</b>	<b>96.06</b>
	1) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	3.300.000	3.170.000	96.06
	<b>c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>498.050.000</b>	<b>3.630.000</b>	<b>0.73</b>
	1) Bintek dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	498.050.000	3.630.000	0.73
<b>II.</b>	<b>MENURUNNYA ANGKA KELAHIRAN TOTAL</b>	<b>260.177.000</b>	<b>179.977.750</b>	<b>69.17</b>
<b>5.</b>	<b>Program Pengendalian Penduduk</b>	<b>251.306.000</b>	<b>172.284.750</b>	<b>68.56</b>
	<b>a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>24.692.000</b>	<b>16.796.750</b>	<b>68.03</b>
	1) Penyerasian kebijakan pembangunan daerah Kabupaten/kota terhadap kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga	116000	0	0
	2) Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	24576000	16796750	68,35
	<b>b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab./Kota</b>	<b>226.614.000</b>	<b>155.488.000</b>	<b>68.61</b>
	1) Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat Integrasi Program KKBPK di sektor lain	64.687.000	55.382.500	85,62
	2) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	2.000.000	2.000.000	100,00
	3) Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	29.422.000	27.842.250	94,63
	4) Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Layanan KB	130.505.000	70.263.250	53,84

No	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen %
7.	<b>Program Pembinaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</b>	<b>8.871.000</b>	<b>7.693.000</b>	<b>86.72</b>
	<b>a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>8.871.000</b>	<b>7.693.000</b>	<b>86.72</b>
	1) Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB),(BKR),(PIK-R),(BKL),(UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Klg.)	116.000	0	0
	2) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	96.000	0	0
	3) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat,Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengolahan Keuangan Klg.)	116.000	0	0
	4) Sosialisasi IPK	6.633.000	6.633.000	100
	5) Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	1.910.000	1.060.000	55
III.	<b>MENINGKATNYA ANGKA PREVALENSI PEMAKAIAN KONTRASEPSI MODERN</b>	<b>4.008.968.100</b>	<b>3.440.215.550</b>	<b>85.81</b>
8.	<b>Program Pembinaan Keluarga Berencana</b>	<b>4.008.968.100</b>	<b>3.440.215.550</b>	<b>85.81</b>
	<b>a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>1.296.206.500</b>	<b>1.066.595.950</b>	<b>82.29</b>
	1) Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholders dan mitra kerja	817.476.000	588.099.750	71,94
	2) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan budaya lokal	67.353.000	67.118.700	99,65
	3) Pengelolaan Operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	411.377.500	411.377.500	100,00
	<b>b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>1.165.161.600</b>	<b>1.149.070.000</b>	<b>98.62</b>
	1) Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	508.800.000	493.730.000	97,04
	2) Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	656.129.600	655.340.000	99,88
	3) Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Pergerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk petugas keluarga berencana/penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	116.000	0	0

No	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen %
	4) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	116.000	0	0
	<b>c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>980.238.000</b>	<b>767.360.600</b>	<b>78.28</b>
	1) Pengendalian Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaring	32.012.000	12.475.000	38,97
	2) Peningkatan Kompetensi Pengelola dan petugas logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan KB	116.000	0	0
	3) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	106.000	0	0
	4) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	267.300.000	267.300.000	100,00
	5) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	9.350.000	0	0
	6) Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta hak-hak reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok kegiatan	116.000	0	0
	7) Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	116.000	0	0
	8) Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	661.410.000	487.585.600	73,72
	9) Peningkatan Kesertaan KB Pria	9.712.000	0	0
	<b>d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB</b>	<b>567.362.000</b>	<b>457.189.000</b>	<b>80.58</b>
	a. Pembinaan Terpadu Kampung KB	567362000	457189000	80,58

No	SASARAN Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen %
I.	<b>MENINGKATNYA TATA KELOLA KINERJA DAN KEUANGAN</b>			
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>59.461.039.200</b>	<b>53.853.010.706</b>	<b>90,57</b>
	<b>a. Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>89.413.700</b>	<b>63.389.600</b>	<b>70,89</b>
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.408.000	20.904.000	93,29
	2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17.306.300	15.392.800	88,94
	3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.198.600	7.478.800	73,33
	4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.635.800	4.160.000	32,92
	5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	11.781.000	8.924.000	75,75
	6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.545.000	2.807.000	37,20
	7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.539.000	3.723.000	49,38
	<b>b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>37.308.000</b>	<b>35.115.600</b>	<b>94,12</b>
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40.028.145.000	39.873.456.015	99,51
	2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	3.500.000	1.310.000	37,43
	3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	33.808.000	33.805.600	99,99
	<b>c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>28.662.000</b>	<b>23.056.400</b>	<b>80,44</b>
	1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	28.662.000	23.056.400	80,44
	<b>d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>261.312.500</b>	<b>202.998.250</b>	<b>77,68</b>
	1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.112.000	4.765.000	93,21
	2) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	256.200.500	198.233.250	77,37
	<b>e. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>422.258.900</b>	<b>378.033.634</b>	<b>89,53</b>
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.880.000	3.897.000	79,86
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.670.900	42.157.000	83,20
	3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000	6.000.000	100,00
	4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.570.000	11.589.800	92,20
	5) Fasilitas Kunjungan Tamu	11.375.000	6.542.000	57,51
	6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	336.763.000	307.847.834	91,41

No	SASARAN Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen %
	<b>f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>8.764.930.000</b>	<b>6.203.280.824</b>	<b>70,77</b>
	1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	643.280.000	554.480.824	86,20
	2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.121.650.000	5.648.800.000	69,55
	<b>g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>225.124.000</b>	<b>167.806.075</b>	<b>74,54</b>
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000	19.819.601	66,07
	2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.112.000	59.996.104	98,17
	3) Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	71.464.000	70.914.370	99,23
	4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.798.000	16.111.000	45,01
	5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kntor atau Bangunan Lainnya	26750000	965000	3,61

## REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2021, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp.13.274.619.000,-** Berpedoman pada proyeksi indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi – strategi kebijakan fiskal sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 diarahkan kepada :

1. Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak yang rasional dan proporsional;
2. Meningkatkan efisiensi Pengelolaan APBD dari sisi belanja;
3. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana perimbangan;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Upaya – upaya efektif dalam penggalan sumber - sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus tergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja, diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat disebar, mengingat struktur ekonomi lebih banyak di dominasi oleh sektor primer, maka sudah saatnya dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber – sumber pendapatan daerah yang berbasiskan pada sektor primer dan mata rantainya. Pendapatan Daerah dikelompokkan kedalam Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan lain – lain Pendapatan yang sah yang masing – masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat.



# **BAB 4 PENUTUP**

**LAPORAN LKJIP  
TAHUN 2021**

**DINAS KESEHATAN,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN 2022**

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang harus memiliki Visi dan Misi yang jelas untuk mencapai tujuan organisasi. Visi dan Misi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 disusun berdasarkan perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023. Upaya Perwujudan Visi dan Misi tersebut dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi yaitu mengarahkan, mengkoordinasikan, membangun harmonisasi dan mengintegrasikan berbagai kebijakan dalam bidang kesehatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi dan pelaporan sehingga menjadi satu kesatuan rangkaian penyelenggaraan pemerintahan yang saling menjadi mendukung dan mendorong percepatan perwujudan Visi Kabupaten Sidenreng Rappang menjadikan Sidenreng Rappang sebagai Sumber ekonomi kerakyatan dan sosial budaya lokal untuk mewujudkan masyarakat yang beriman, sejahtera, dan berdaya saing.

Dokumen LKJIP ini berupaya memaparkan sasaran dan indikator kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang dalam upaya pencapaian target kinerja Tahun 2021, dengan seluruh hasil capaiannya sangat baik. Persentase capaian kinerja atas indikator sasaran melalui penetapan kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2021 mencapai target. Realisasi Anggaran Tahun 2021 dengan pagu P-APBD **Rp. 105.472.769.246,-** terserap sebesar **Rp.93.554.422.972** atau **88,70%**.

Faktor pendorong dalam capaian keberhasilan kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 antara lain komitmen tenaga kesehatan dengan masyarakat untuk mengedepankan prinsip promotif dan preventif. Di samping itu, semakin selarasnya berbagai kebijakan pusat dan lintas sektoral menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mencapai hidup sehat secara mandiri. Hal tersebut telah mendorong tingkat koordinasi yang semakin tinggi dalam upaya terus meningkatkan pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja pelaksanaan tugas pokok Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain :

- A. Terbatasnya tenaga, baik segi kuantitatif maupun kualitatif jika dibandingkan dengan jumlah penduduk
- B. Sarana dan Prasarana serta Alat Kesehatan di bidang Kesehatan belum mencapai ideal.
- C. Kondisi alam berupa Cuaca dan geografis yang memicu terjadinya bencana (banjir) di sebagian wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan banyaknya genangan air mempermudah perkembangbiakan nyamuk dan sumber penularan penyakit lainnya.

## **B. LANGKAH KEDEPAN**

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain :

1. Pemanfaatan dan pemerataan sarana prasarana serta alat kesehatan yang tersedia untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan secara efektif.
2. Pemanfaatan SDM Kesehatan dan tenaga kontrak yang mendukung jasa pelayanan kesehatan yang tersedia.
3. Sosialisasi dan pembinaan secara intensif ke puskesmas.
4. Memperkuat kerjasama lintas sektor dan pihak ketiga yang dapat mendukung pembangunan kesehatan.
5. Pengefektifan sistem keuangan dan anggaran
6. Prioritas upaya kesehatan pada kegiatan promotif dan preventif di samping upaya kuratif dan rehabilitatif.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang dengan harapan dapat memberikan gambaran yang mencukupi tentang akuntabilitas capaian kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan anggaran Tahun 2021.

